

## **E-Voting Kepala Desa dan Modal Sosial**

### ***E-Voting of The Village Head and Social Capital***

Khaulah Afifah<sup>1)</sup>, Lala M. Kolopaking<sup>2)</sup>, Zessy Ardinal Barlan<sup>3)</sup>

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

E-mail: [khaulahaffh@gmail.com](mailto:khaulahaffh@gmail.com); [lalako@apps.ipb.ac.id](mailto:lalako@apps.ipb.ac.id); [zessyardinalbarlan@apps.ipb.ac.id](mailto:zessyardinalbarlan@apps.ipb.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Head of village election with e-voting system is a new thing for community. The success level of e-voting system can be reached by fulfilling several principles in order to the implementation going effective and the result of the election can be accepted by all. The objectives of this research is to analyze the relation between the success level of e-voting system with social capital of the community. This research is carried out with the quantitative approach and supported by qualitative data. This research takes 60 respondents using simple random sampling technique. The results showed that the success level of e-voting has a correlation with the level of social capital of the community. Based on the field study, the social capital of the community is classified as high. The high social capital makes the implementation of e-voting successful and the success level is also high, because in the election ten years ago occurred a conflict. The community considers e-voting easier and more practical, cost effective and time-saving, and the results of e-voting are also reliable. A practical and fast of e-voting system can be a solution especially for "rural-urban" community who are busy or work outside the village.*

**Keywords :** *E-voting, the success level of system, social capital*

#### **ABSTRAK**

Pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Keberhasilan penerapan sistem *e-voting* dilihat dari terpenuhinya beberapa prinsip agar penerapannya berlangsung efektif dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat keberhasilan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dengan tingkat modal sosial masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didukung oleh analisis data kualitatif. Penelitian ini mengambil enam puluh responden dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan *e-voting* memiliki hubungan dengan tingkat modal sosial masyarakat. Berdasarkan kajian di lapangan, modal sosial masyarakat tergolong tinggi. Tingginya modal sosial tersebut membuat pelaksanaan *e-voting* berhasil dan tingkat keberhasilannya juga tergolong tinggi karena pada pemilihan sepuluh tahun silam sempat terjadi konflik. Masyarakat menganggap sistem *e-voting* lebih mudah dan praktis, hemat dalam segi biaya dan waktu, serta hasil dari pemilihan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sistem *e-voting* yang praktis dan cepat dapat menjadi solusi khususnya bagi masyarakat daerah "desa-kota" yang memiliki kesibukan atau pekerjaan di luar desa.

**Kata Kunci :** *E-voting, keberhasilan sistem, modal sosial*

#### **PENDAHULUAN**

Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jawandri (2013) bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon

kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Dilaksanakannya pemilihan kepala desa diharapkan dapat melahirkan pemimpin terpilih yang mampu membawa masyarakat desa menjadi lebih baik. Menurut Umar *et al* (2014) pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting,

karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa memiliki hubungan dengan modal sosial masyarakat yang melaksanakannya. Hal tersebut didukung oleh Alamsyah (2011) dalam penelitiannya menemukan pada masa Pemilihan Kepala Desa Kembang Sari tahun 2010, masyarakat mendiskusikan kandidat kepala desa. Hal yang didiskusikan sangat beragam, meliputi latar belakang keluarga, sosok kepribadian, dan sepak terjang kandidat yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakat. Semua informasi itu mengalir dari mulut ke mulut sehingga membentuk kerangka pikir masyarakat yang pada akhirnya menuntun mereka untuk memilih kepala desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada masa pemilihan kepala desa terjadi interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat merupakan aktivitas yang menggambarkan jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi modal sosial menurut Putnam (1998). Kemudian pada penelitian Jawandri (2013) juga menemukan perselisihan di antara masyarakat pada saat penentuan calon kepala desa yang akan dipilih. Masyarakat akhirnya menyepakati bahwa calon kepala desa harus berasal dari warga asli desa, karena hal tersebut telah menjadi peraturan yang telah disepakati secara turun-temurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap nilai dan norma yang telah lama ada tergolong tinggi. Nilai dan norma juga merupakan salah satu dimensi modal sosial menurut Putnam (1998). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan modal sosial masyarakat di dalamnya.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara konvensional ditemukan beberapa kekurangan, salah satunya kesalahan pencoblosan yang menyebabkan surat suara rusak sehingga suara tersebut dinyatakan gugur atau tidak sah. Hal tersebut tidak akan terjadi dalam pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (IDEA 2011). *E-voting* pada hakikatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara (Rokhman 2011). Maka dari itu munculah *e-voting* dengan segala kelebihan,

di antaranya penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat, hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan berdasarkan, pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia, pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah, dan lain-lain (IDEA 2011).

Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor merupakan desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada bulan Maret 2017. Pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa di Desa Babakan menjadi sorotan karena diberlakukannya sistem *e-voting* untuk pertama kalinya di Kabupaten Bogor. Hal yang perlu disoroti dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak hanya pada prosesnya, namun hasil dari pemilihan yang juga menentukan modal sosial masyarakat desa setelah pemilihan selesai dilaksanakan. Oleh karena itu penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Babakan menjadi hal yang menarik untuk diteliti, bagaimana sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa yang merupakan sistem baru dengan berbagai prinsip yang dimilikinya memiliki hubungan dengan modal sosial yang telah lama ada di tengah-tengah masyarakat?

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Pemilihan Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Jawandri (2013) pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa dilakukan setiap periode enam tahun, kemudian kepala desa dapat dipilih kembali dalam dua kali periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak, sesuai dengan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 39 ayat 1 dan 2. Kemudian, pemilihan kepala desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang

diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni 1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; 2) pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lestarini (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan kepala desa, atau seringkali disingkat pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

### ***E-Voting***

Menurut Rokhman (2011) *e-voting* pada hakikatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Sistem *electronic voting (e-voting)* adalah evolusi dari sistem *voting* bersifat konvensional yaitu dengan menggunakan kertas sebagai media untuk melakukan pemilihan menjadi sistem pemilihan berbasis aplikasi yang diterapkan pada komputer serta pengolahan data hasil *voting* langsung oleh sistem dan mendapatkan hasil cepat dari *voting* yang telah dilaksanakan (Permana *et al* 2016).

*E-voting* telah banyak diberlakukan di beberapa negara, seperti Australia, Brazil, Estonia, Perancis, India, dan Indonesia. *E-voting* di Indonesia pertama kali diadakan di Kabupaten Jembrana, Bali. *E-voting* digunakan untuk pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali telah melakukan rintisan pemilihan kepala dusun dengan sistem *e-voting* sejak tahun 2009. Data pemilih diperoleh dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimasukkan ke dalam komputer *e-voting* yang dilengkapi dengan layar sentuh. Hingga tahun 2010,

telah dilaksanakan *e-voting* pilkades sebanyak 60 kali (Sopnan dan Rohman 2012)

### **Prinsip-Prinsip *E-voting***

Menurut Rokhman (2011) supaya *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *e-voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (*Internet Policy Institute* dalam Rokhman 2011):

1. *Eligibility and Authentication*: hanya pemilih yang sah yang diizinkan untuk memilih,
2. *Uniqueness*: tidak ada pemilih yang diizinkan untuk memilih lebih dari satu kali,
3. *Accuracy*: sistem pemilihan harus merekam pilihan dengan benar,
4. *Integrity*: pilihan tidak dapat dirubah atau dihapus tanpa terdeteksi,
5. *Verifiability and auditability*: memungkinkan untuk memverifikasi bahwa semua pilihan telah terhitung dengan benar, dan diperlukan adanya riwayat pemilihan otentik yang dapat dipercaya dan dibuktikan,
6. *Reliability*: sistem pemilihan harus bekerja dengan sehat, tanpa kehilangan data pemilihan walaupun dihadapi dengan banyak kegagalan, termasuk kegagalan pada alat pemilihan dan koneksi internet,
7. *Secrecy and non-coercibility*: tidak ada yang dapat memastikan bagaimana seorang individu memilih, dan pemilih tidak perlu membuktikan bagaimana dia memilih,
8. *Flexibility*: peralatan pemilihan harus dapat memuat berbagai variasi dari format pertanyaan pada surat suara (misalnya tulisan tentang kandidat, pertanyaan-pertanyaan survey, multi bahasa); cocok dengan berbagai variasi wadah standar dan teknologi serta dapat diakses oleh orang yang menyandang disabilitas,
9. *Convenience*: pemilih dapat menjatuhkan pilihan dengan cepat dengan peralatan atau kemampuan yang minimum,
10. *Certifiability*: sistem pemilihan telah melalui percobaan sehingga panitia pemilihan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka menemukan kriteria yang tepat,

11. *Transparency*: pemilih harus diizinkan untuk mengetahui pemilihan secara keseluruhan dan memahami proses pemilihan,
12. *Cost-effectiveness*: sistem pemilihan harus terjangkau dalam segi biaya dan efisien.

### **Kelebihan dan Kekurangan E-voting**

Sistem *e-voting* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kelebihan berkaitan dengan *e-voting* (IDEA 2011):

1. Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat.
2. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan,
3. Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan,
4. Peningkatan tampilan surat suara yang rumit.
5. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih.
6. Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan melalui Internet.

Beberapa kelemahan berkaitan dengan *e-voting* (IDEA 2011):

1. Kurangnya transparansi,
2. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya,
3. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem *e-voting*,
4. Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas,
5. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan,
6. Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar,

### **Modal Sosial**

Uphoff (2000) menyatakan bahwa modal sosial adalah akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aset-aset yang terkait dan dapat meningkatkan kemungkinan manfaat bersama dari perilaku kerja sama. Aset diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengalirkan manfaat bagi diri sendiri dan pihak lain untuk membuat proses produktif di masa

mendatang lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat diperluas atau disebarkan dengan mudah.

Putnam dalam Muwarni (2013) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Burt dalam Kusumastuti (2013) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Kemudian Primadona (2012) menjelaskan bahwa modal sosial (*social capital*) merupakan struktur hubungan yang menjadi modal dalam pencapaian tujuan hidup. Struktur tersebut diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, partisipasi, adat istiadat dan bentuk sosial lainnya yang difasilitasi oleh rasa saling mempercayai.

### **Dimensi dan Tipologi Modal Sosial**

Nasdian (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa modal sosial memiliki empat dimensi. Pertama adalah integrasi (*integration*), yaitu ikatan yang kuat antar anggota keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya, ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan, etnik dan agama. Kedua, pertalian (*linkage*), yaitu ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas asal. Contohnya, jejaring (*network*) dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan (*civic associations*) yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama. Ketiga, integritas organisasional (*organizational integrity*), yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. Keempat, sinergi (*synergy*), yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas (*state-community relations*). Fokus perhatian dalam sinergi ini adalah apakah negara memberikan ruang yang luas atau tidak bagi partisipasi warganya.

Hasbullah (2006) membedakan tipologi modal sosial menjadi *bridging/inclusive* dan *bonding/eksklusive*. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada

hasil yang dapat dicapai serta pengaruh yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat. Tipologi modal sosial *bonding/eksklusif* menurut Winarni (2011) mengacu pada struktur hubungan antar pelaku dalam kolektivitas serta jenis hubungannya. Karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini yakni kelompok maupun anggota kelompok dalam konteks ide, relasi dan perhatian lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan lebih eksklusif. Ragam masyarakat atau individu yang menjadi anggota kelompok lebih homogen (Hasbullah 2006). Masyarakat cenderung lebih konservatif dan lebih mengutamakan solidaritas dari pada hal untuk membangun diri dan kelompok sesuai dengan tuntutan nilai dan norma pada masyarakat yang lebih terbuka.

Sementara itu, modal sosial *bridging* biasa disebut modal sosial modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Tipologi modal sosial *bridging* memberikan konsekuensi pada keanggotaan yang heterogen dari berbagai unsur latar belakang budaya dan suku dan bersifat *inclusive* serta *outward looking* (Hasbullah 2006). Dengan sifat *outward looking* memungkinkan kelompok untuk menjalin koneksi dengan asosiasi atau jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya. Ide yang terus berkembang akan menstimulasi perkembangan kelompok dan tentu individu dalam kelompok tersebut sehingga kemajuan akan mudah dicapai (Hasbullah 2006).

### **Pemilihan Kepala Desa dan Modal Sosial Masyarakat**

Pada dasarnya pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* memiliki kesamaan dengan pemilihan kepala desa dengan sistem konvensional, perbedaannya hanya terletak pada saat pemilihan dilakukan. Pada sistem *e-voting* pemilihan dilakukan tidak lagi menggunakan kertas yang dicoblos melainkan menggunakan layar monitor yang dapat disentuh. Oleh karena itu disebut elektronik *voting* yang disingkat menjadi *e-voting* karena berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jawandri (2013) terdapat hubungan antara proses pemilihan kepala desa dengan modal sosial masyarakat di Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan. Pada tahap penjurian dan seleksi bakal calon kepala desa terdapat perbedaan pendapat diantara masyarakat. Perselisihan yang terjadi disebabkan karena adanya salah satu calon kepala

desa yang bukan merupakan masyarakat asli daerah tersebut. Masyarakat terbagi menjadi dua kubu, ada yang mengizinkan karena mempertimbangkan latar belakang pendidikan, moral, dan perilaku yang baik selama menjadi warga Desa Tanjung Nanga. Namun ada juga masyarakat yang tidak setuju karena sejak bertahun-tahun yang lalu, posisi kepala desa selalu ditempati oleh calon yang merupakan penduduk asli Desa Tanjung Nanga karena dianggap mampu bertugas menjadi kepala desa dan komitmennya dalam membangun desa tidak perlu diragukan lagi. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan hasil bahwa yang menjadi calon kepala desa saat itu harus merupakan warga asli Desa Tanjung Nanga.

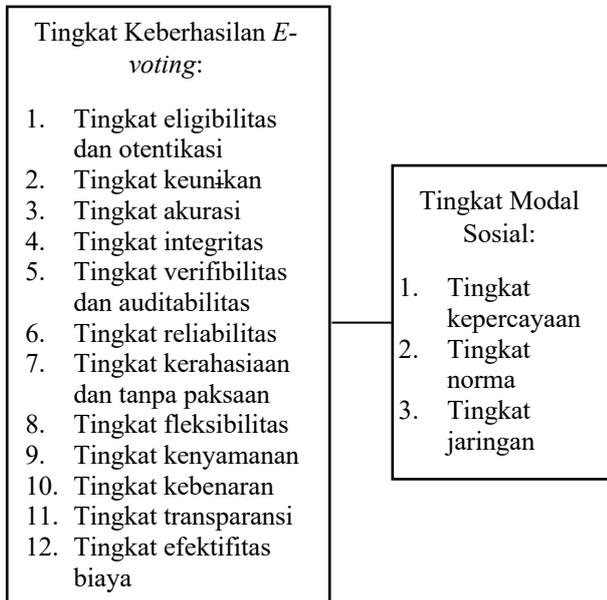
Hasil penelitian Jawandri (2013) menunjukkan adanya hubungan antara pemilihan kepala desa dengan modal sosial masyarakat, khususnya pada tahap penjurian dan seleksi bakal calon kepala desa. Terdapat peraturan yang sejak lama ada di tengah masyarakat dan berusaha untuk dipertahankan, yaitu peraturan bahwa yang menjadi calon kepala desa harus merupakan warga asli desa tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu aspek modal sosial, yaitu norma dimana hal tersebut menjadi sebuah peraturan tidak tertulis namun secara terus menerus tetap ditaati oleh masyarakat.

### **Kerangka Pemikiran**

Tingkat keberhasilan merupakan keadaan yang menjelaskan terpenuhinya prinsip-prinsip *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tingkat keberhasilan *e-voting* dapat diukur melalui dua belas aspek, diantaranya tingkat eligibilitas dan otentikasi, tingkat keunikan, tingkat akurasi, tingkat integritas tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas, tingkat reliabilitas, tingkat kerahasiaan dan tanpa paksaan, tingkat fleksibilitas, tingkat kenyamanan, tingkat kebenaran, tingkat transparansi, dan tingkat efektivitas biaya. Kedua belas aspek tersebut menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa.

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*sosial trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Modal sosial dapat diukur melalui tiga aspek, di antaranya 1) tingkat kepercayaan yaitu komponen mengenai bagaimana seseorang percaya kepada orang lain dalam suatu komunitas, 2) tingkat norma yaitu peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu hubungan relasional antar individu dalam

masyarakat, 3) tingkat jaringan yaitu relasi-relasi yang terbentuk dari interaksi antar individu dalam masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas maka penelitian ini akan melihat hubungan antara keberhasilan *e-voting* kepala desa yang dilihat dari prinsip-prinsip *e-voting* dengan tingkat modal sosial. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat hubungan antar variabel. Data kualitatif digunakan untuk menggali informasi yang sifatnya lebih dalam serta untuk memperjelas gambaran tentang keadaan sosial yang diperoleh melalui pendekatan kuantitatif (Singarimbun dan Effendi 2014). Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpul data. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan maupun responden. Kedua pendekatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui literatur dan data yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian *explanatory*. Menurut Singarimbun dan Effendi (2014) penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dan

menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (*purposive*) dengan beberapa pertimbangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desa Babakan sebagai “Desa-Kota” yang Melaksanakan *E-Voting*

Pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No. 523.31/227/Ktps/Huk/2010 Kecamatan Ciseeng menjadi salah satu kawasan minapolitan untuk daerah di Kabupaten Bogor. Komoditas yang dikembangkan pada kawasan minapolitan ini adalah ikan lele, ikan gurame, serta ikan hias. Desa Babakan, sebagai salah satu desa di Kecamatan Ciseeng juga termasuk menjadi kawasan minapolitan. Salah satu komoditas unggulan di Desa Babakan adalah ikan lele. Hal tersebut tercermin dengan adanya tugu lele yang dibangun di kawasan desa. Desa dengan luas 456,945 ha ini terdiri dari 7 dusun, 14 Rukun Warga (RW), dan 47 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data Kecamatan Ciseeng dalam Angka tahun 2016 jumlah penduduk Desa Babakan sebanyak 13.183 jiwa dengan presentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 52,2% dan penduduk perempuan sebesar 47,8%. Jumlah penduduk di Desa Babakan merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan seluruh desa yang termasuk dalam Kecamatan Ciseeng.

Pada aspek ekonomi, berdasarkan Data Monografi Desa Tahun 2016 penduduk di Desa Babakan memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, seperti pedagang, buruh tani, buruh bangunan, guru, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh industri atau karyawan di luar desa. Berdasarkan aspek ekonomi yang dilihat dari mata pencaharian penduduknya, Desa Babakan termasuk ke dalam “desa-kota” atau biasa dikenal dengan desa *urban*. Hal tersebut dikarenakan sebagai wilayah yang tergolong desa, mata pencaharian utama penduduk Desa Babakan sudah tidak lagi di bidang pertanian, bahkan cukup banyak penduduknya yang bekerja sebagai buruh industri di luar desa.

### Desa Babakan sebagai Desa yang Melaksanakan *E-Voting*

Terpilihnya Desa Babakan sebagai desa yang menjadi penyelenggara pertama pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* bukan tanpa pertimbangan dan proses yang panjang. Sebelum terpilih, Desa Babakan harus melewati tahap seleksi dengan tiga desa yang juga mengajukan diri untuk dilaksanakannya *e-voting* di desa mereka masing-masing. Kemudian keempat desa tersebut diundang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor untuk melakukan seleksi. Setelah seleksi dilakukan, Desa Babakan lah yang memperoleh nilai tertinggi dan dianggap paling siap untuk melaksanakan *e-voting*.

Lamanya persiapan yang dilakukan panitia untuk pelaksanaan *e-voting* kepala desa di Desa Babakan adalah sekitar tiga bulan, mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, uji coba alat serta persiapan lainnya. Tidak mudah memang mengingat *e-voting* ini merupakan hal yang sangat baru bagi masyarakat termasuk bagi para panitia pemilihan, sehingga selain memperkenalkan kepada masyarakat, para panitia juga perlu diperkenalkan dan dilatih terlebih dahulu. Tantangan yang dihadapi juga beragam, seperti masih banyak warga yang belum memiliki *e-ktp* sedangkan *e-ktp* merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki pemilih pada saat pemilihan dilakukan. Sehingga panitia bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki *e-ktp* agar melakukan perekaman di Kecamatan Ciseeng. Selain itu panitia juga harus menghadapi kekhawatiran masyarakat khususnya para lansia terhadap sistem *e-voting*, panitia memaklumi hal tersebut karena *e-voting* merupakan hal baru bagi masyarakat Desa Babakan dan berusaha mengatasinya dengan berbagai sosialisasi serta uji coba yang dilakukan. Upaya tersebut membuat kekhawatiran masyarakat berkurang bahkan menghilang setelah merasakan memilih langsung karena merasa lebih mudah dan cepat.

### Keberhasilan *E-Voting* Kepala Desa

Tingkat keberhasilan merupakan keadaan yang menjelaskan terpenuhinya prinsip-prinsip *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tingkat keberhasilan *e-voting* dapat diukur melalui dua belas aspek, di antaranya tingkat eligibilitas dan otentikasi, tingkat keunikan, tingkat akurasi, tingkat integritas, tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas, tingkat reliabilitas, tingkat kerahasiaan dan tanpa paksaan, tingkat fleksibilitas, tingkat kenyamanan, tingkat kebenaran, tingkat transparansi, dan tingkat

efektifitas biaya. Kedua belas aspek tersebut menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan *e-voting* kepala desa. Tabel 1 menunjukkan jumlah dan persentase responden menurut tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa di Desa Babakan.

Tabel 1 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa di Desa Babakan

Kategori Tingkat Keberhasilan <i>E-Voting</i> Kepala Desa	Jumlah (n)	Persen (%)
Rendah	13	21,7
Sedang	22	36,7
Tinggi	25	41,7
Total	60	100,0

Berdasarkan Tabel 1 jika dilihat dari jumlah dan persentase responden menurut tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa di Desa Babakan tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan terpenuhinya kedua belas prinsip *e-voting* pada pelaksanaan pemilihan, dari dua belas prinsip hampir semuanya tergolong tinggi dan hanya tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dan tingkat kebenaran yang tergolong sedang.

Tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas yang tergolong rendah disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak menyaksikan perhitungan serta pengumuman hasil akhir pemilihan. Namun jika dilihat, panitia telah memfasilitasi masyarakat untuk dapat menyaksikan proses perhitungan dan pengumuman hasil pemilihan namun banyak pemilih yang memilih untuk langsung kembali ke rumah setelah melakukan pemilihan. Padahal, tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas merupakan salah satu prinsip yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan *e-voting* karena berkaitan dengan rasa percaya masyarakat. Kemudian tingkat kebenaran yang tergolong sedang disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mengikuti kegiatan uji coba alat *e-voting*, bahkan masih ada yang tidak mengetahui adanya uji coba tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, apabila dilihat secara keseluruhan pelaksanaan pemilihan *e-voting* kepala desa berlangsung kondusif. Hasil dari pemilihan juga dapat diterima oleh masyarakat dan kemampuan sistem untuk bekerja dengan cepat pun menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa sistem pemilihan

yang baru dilakukan pertama kali ini dianggap berhasil dan diterima masyarakat karena dianggap sangat menghemat waktu. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Babakan tergolong tinggi.

### Modal Sosial Masyarakat

Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong pada aksi kolaborasi sosial dalam sebuah kelompok atau komunitas yang untuk kepentingan bersama. Tingkat modal sosial masyarakat suatu wilayah dilihat melalui kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya juga pemimpinnya, nilai atau norma yang berlaku di tengah masyarakat, juga luasnya jaringan yang dimiliki masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Desa Babakan yang tergolong dalam “desa-kota” memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah dan persentase responden menurut tingkat modal sosial masyarakat Desa Babakan.

Tabel 2 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat modal sosial masyarakat Desa Babakan

Kategori Tingkat Modal Sosial	Jumlah (n)	Persen (%)
Rendah	0	0
Sedang	28	46,7
Tinggi	32	53,3
Total	60	100,0

Berdasarkan Tabel 2 jika dilihat dari jumlah dan persentase responden menurut tingkat modal sosial maka dapat dikatakan bahwa tingkat modal sosial masyarakat Desa Babakan tergolong tinggi. Hal tersebut dilihat dari tingginya rasa percaya masyarakat terhadap lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian, masih terdapat nilai dan norma yang terpelihara dengan baik hingga kini, misalnya nampan keliling. Nampan keliling adalah kebiasaan yang dilakukan warga Desa Babakan ketika ada salah satu warga yang meninggal, dimana yang menyediakan konsumsi untuk acara pengajiannya adalah para tetangga sekitar secara bergantian. Selain itu jaringan yang dimiliki juga cukup luas karena di Desa Babakan hampir setiap hari di setiap RW nya dilaksanakan pengajian dan

hampir semua responden dalam penelitian ini mengikuti pengajian tersebut minimal seminggu sekali. Tentu hal tersebut membuat tali silaturahmi antar warga menjadi semakin kuat dan dengan pengajian rutin tersebut jaringan yang dimiliki semakin luas.

Pengajian rutin yang dihadiri masyarakat desa juga menjadi salah satu sarana dalam mensosialisasikan sistem *e-voting* yang akan digunakan pada pemilihan kepala desa saat itu. Mayoritas masyarakat Desa Babakan yang berasal dari suku sunda dan dikenal gemar hidup berkelompok membuat kegiatan pengajian rutin di setiap RW nya menjadi momen yang tepat bagi panitia untuk mensosialisasikan sistem *e-voting* tersebut.

Faktor lain yang membuat modal sosial masyarakat Desa Babakan tergolong tinggi adalah peristiwa yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 1998 lalu. Pada pemilihan tersebut terjadi konflik atau bentrokan yang disebabkan karena ketidakpuasan sebagian warga yang tidak dapat menerima hasil akhir pemilihan. Mereka menganggap hasil pemilihan tidak *fair* dan diragukan kebenarannya. Puncak dari konflik yang terjadi adalah terjadinya peristiwa pembakaran kantor desa oleh pihak-pihak yang menentang hasil pemilihan tersebut. Bahkan mereka meminta panitia untuk melakukan pemilihan ulang dan jika tidak dikabulkan mereka mengancam akan membuat keributan yang lebih besar. Beruntung masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik melibatkan beberapa tokoh yang melakukan negosiasi dengan pihak-pihak tersebut dan seiring berjalannya waktu konflik perlahan mereda yang ditandai dengan kondisi masyarakat menjadi semakin baik. Peristiwa tersebut menjadi bahan pembelajaran dan bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang terlibat, sehingga membuat pemilihan-pemilihan selanjutnya berlangsung lebih kondusif baik dalam segi pelaksanaan dan kondisi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu juga pada pemilihan dengan sistem *e-voting* tahun 2017 lalu, walaupun terbilang baru bagi masyarakat desa tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

### Hubungan Keberhasilan *E-Voting* dan Modal Sosial Masyarakat

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang erat kaitannya dengan politik merupakan isu sensitif yang dapat menjadi penguat sekaligus pemecah dalam masyarakat. Pemilihan kepala desa menjadi momentum yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bermasyarakat setelahnya. Pada

pelaksanaannya, pemilihan kepala desa sarat akan persaingan antar calon yang bersaing untuk merebutkan satu kursi menjadi orang nomor satu di desa. Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi spearman untuk melihat hubungan tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial masyarakat. Tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dilihat dari terpenuhinya prinsip-prinsip pelaksanaan *e-voting* dan diterima tidaknya hasil pemilihan oleh sebagian besar masyarakat desa. Sedangkan tingkat modal sosial masyarakat diukur dari kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan dan orang-orang sekitarnya, nilai atau norma yang berlaku, serta luasnya jaringan yang dimiliki. Oleh karena itu dilakukan uji korelasi antara tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial. Tabel berikut adalah hasil uji korelasi dan tabulasi silang antara tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial.

Tabel 3 Hasil uji korelasi tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial

Variabel		Tingkat Modal Sosial
Tingkat Keberhasilan <i>E-Voting</i> Kepala Desa	<i>Correlation Coefficient</i> Sig. (2-tailed) N	0,431** 0,001 60

Keterangan: (\*\*) adanya hubungan korelasi variabel yang sangat nyata, nilai signifikansi  $<0,01$  ( $\alpha < 0,01$ )

Berdasarkan Tabel 4, responden dengan tingkat keberhasilan tinggi dan tingkat modal sosial tinggi sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 80 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan *e-voting* maka semakin tinggi juga tingkat modal sosial. Kemudian berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dan tingkat modal sosial adalah sebesar 0,431. Kemudian, hasil signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,001 < \alpha$  (0,01). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial. Kemudian, berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan pada kedua belas prinsip dengan tingkat modal sosial, ditemukan terdapat tiga prinsip yang berhubungan dengan modal sosial, diantaranya tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas, tingkat fleksibilitas, dan tingkat efektifitas biaya.

Tabel 4 Tabulasi silang tingkat keberhasilan *e-voting* dengan tingkat modal sosial

		Tingkat Modal Sosial			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Tingkat Keberhasilan	Rendah	n 0	9	4	13
	%	0	69,2	30,8	100,0
Sedang	n	0	14	8	22
	%	0	63,6	36,4	100,0
Tinggi	n	0	5	20	25
	%	0	20,0	80,0	100,0
Total	n	0	28	32	60
	%	0	46,7	53,3	100,0

### Hasil *E-Voting* Kepala Desa dapat Dipertanggungjawabkan

Pelaksanaan *e-voting* untuk pertama kalinya di Kabupaten Bogor khususnya di Desa Babakan memang melalui proses yang panjang, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Salah satu tantangan yang ditemui dalam proses implementasi sistem baru tersebut adalah adanya pro kontra ditengah masyarakat. Sistem *e-voting* yang erat kaitannya dengan teknologi hadir dengan segala kelebihan tentu mengundang reaksi masyarakat, ada yang memercayai dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bagus, namun tidak sedikit juga yang meragukan keakuratannya. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengikis keraguan tersebut adalah dengan menyampaikan hasil pemilihan dengan jujur, rinci, dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelaksanaan *e-voting*, yaitu tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas. Tabel 5 berikut merupakan hasil uji korelasi antara tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dengan tingkat modal sosial.

Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dan tingkat modal sosial adalah sebesar 0,372. Kemudian, hasil signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,003 < \alpha$  (0,01). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dengan tingkat modal sosial.

Tabel 5 Hasil uji korelasi tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dengan tingkat modal sosial

Variabel		Tingkat Modal Sosial
Tingkat Verifiabilitas dan Auditabilitas	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	0,372** 0,003 60

Keterangan: (\*\*) adanya hubungan korelasi variabel yang sangat nyata, nilai signifikansi  $<0,01$  ( $\alpha < 0,01$ )

Tingkat verifiabilitas dan auditabilitas pada penelitian ini dilihat dari ditampilkan tidaknya jumlah perolehan suara yang sah dan jumlah perolehan suara yang tidak memilih saat perhitungan suara setelah pemilihan selesai ternyata memiliki hubungan dengan tingkat modal sosial khususnya dalam aspek kepercayaan. Ditampilkannya perolehan suara yang sah dan suara yang tidak memilih membangun rasa percaya responden akan keakuratan sistem yang digunakan dalam pemilihan. Terlebih lagi sistem *e-voting* ini merupakan hal yang baru, sehingga terdapat pro dan kontra di dalamnya sehingga dibutuhkan upaya untuk membuat pemilih percaya akan sistem tersebut. Dengan ditampilkannya jumlah suara yang sah dan jumlah suara yang tidak memilih dapat menjadi salah satu bukti bahwa sistem bekerja dengan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena setiap suara yang masuk tercatat dengan baik oleh sistem yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hasil *e-voting* kepala desa di Desa Babakan disampaikan sesuai dengan prinsipnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan perolehan suara yang ditampilkan tidak hanya hasil akhirnya saja, namun juga perolehan masing-masing pada setiap bilik suara sehingga semua pihak yang menyaksikan juga dapat melakukan perhitungan sendiri. Hal tersebut meningkatkan rasa percaya masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang disebabkan oleh rasa tidak percaya atau keraguan akan hasil pemilihan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil pemilihan *e-voting* kepala desa yang dapat dipertanggungjawabkan membuat modal sosial masyarakat menjadi lebih kuat.

### Sistem E-Voting User Friendly

Pelaksanaan *e-voting* kepala desa di Desa Babakan tentunya sangat didukung dengan adanya alat *e-voting* itu sendiri. Alat *e-voting* dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* untuk

pertama kalinya di Kabupaten Bogor yang berlokasi di Desa Babakan pada saat itu. Selain performanya selama digunakan dalam pemilihan, alat *e-voting* juga harus dapat digunakan oleh siapa pun tanpa terkecuali, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan pemilih yang tidak dapat membaca karena salah satu tujuan diadakannya *e-voting* kepala desa ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan menghemat waktu. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip *e-voting*, yaitu fleksibilitas. Dilakukan uji korelasi antara tingkat fleksibilitas dengan tingkat modal sosial yang hasilnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6 Hasil uji korelasi tingkat fleksibilitas dengan tingkat modal sosial

Variabel		Tingkat Modal Sosial
Tingkat Fleksibilitas	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	0.439** 0.000 60

Keterangan: (\*\*) adanya hubungan korelasi variabel yang sangat nyata, nilai signifikansi

$<0,01$  ( $\alpha < 0,01$ )

Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat fleksibilitas dan tingkat modal sosial adalah sebesar 0,439. Kemudian, hasil signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,000 < \alpha$  ( $0,01$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat fleksibilitas dengan tingkat modal sosial.

Pelaksanaan *e-voting* kepala desa memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sebagaimana yang tertera dalam Tabel 6 hal tersebut berarti sistem *e-voting* yang berbasis teknologi tidak menyulitkan pemilih atau dengan kata lain alat yang digunakan mudah dioperasikan oleh siapapun. Fleksibilitas alat *e-voting* memiliki hubungan dengan tingkat modal sosial karena berdasarkan keterangan responden alat *e-voting* yang digunakan mudah dioperasikan termasuk untuk lansia, penyandang disabilitas, dan buta aksara. Selain itu, menurut responden ketika pemilihan dilakukan, para lansia juga didahulukan untuk memilih dan tidak diperkenankan untuk menunggu terlalu lama. Berdasarkan Data Kecamatan Ciseeng dalam Angka Tahun 2016, sebaran umur penduduk terbanyak di Desa Babakan adalah pada rentang 55 tahun keatas sehingga lansia

memang diprioritaskan dalam pemilihan. Sehingga tumbuh rasa percaya khususnya dari para lansia terhadap panitia pemilihan kepala desa bahwa keberadaan mereka dihargai dan diprioritaskan. Tidak ada pihak yang merasa tersisihkan atau dinomorduakan, karena hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh para panitia agar pemilihan adil untuk semua pihak yang memang memiliki hak pilih. Dengan begitu hubungan yang terjalin diantara pemilih dan panitia pemilihan yang sama-sama penduduk Desa Babakan terjaga dengan baik. Hubungan yang baik antar sesama warga berkaitan dengan salah satu aspek modal sosial yaitu jaringan. Tidak hanya itu, bagi pemilih yang merasa kesulitan, seperti lansia yang sudah tidak bisa berjalan maupun yang tidak bisa membaca, maka panitia akan mendampingi. Berdasarkan hal tersebut terdapat nilai saling menghargai dan tolong menolong yang lekat, dimana nilai-nilai tersebut yang terus dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilihan kepala desa. Nilai-nilai tersebut memiliki hubungan dengan salah satu aspek modal sosial yaitu norma.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikatakan alat yang digunakan dalam *e-voting* kepala desa mudah untuk dioperasikan atau *user friendly* sehingga memudahkan para pemilih selama proses pemilihan. Tidak hanya itu pemilih juga tidak memerlukan waktu yang lama juga kemampuan khusus untuk mengoperasikan alat tersebut. Sehingga semua pihak yang memiliki hak suara dapat memberikan suaranya, termasuk para lansia, penyandang disabilitas, dan buta aksara. Tidak ada pihak yang merasa tidak diperhatikan atau tidak diprioritaskan maka hal tersebut membuat modal sosial masyarakat Desa Babakan menjadi semakin kuat terutama dalam aspek jaringan. Komunikasi yang terjalin antara pemilih dan panitia cukup baik, sehingga segala keperluan pemilih berusaha untuk diperhatikan dan dipenuhi.

### **Pelaksanaan E-Voting Kepala Desa Hemat Biaya dan Waktu**

Salah satu kelebihan yang dimiliki sistem *e-voting* adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan lebih hemat, sesuai dengan salah satu prinsip *e-voting* yaitu efektivitas biaya. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa sistem ini layak untuk digunakan dalam pemilihan kepala desa yang diharapkan akan terus digunakan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya. Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi antara tingkat efektivitas biaya dengan

tingkat modal sosial dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Hasil uji korelasi tingkat efektivitas biaya dengan tingkat modal sosial

		Tingkat Modal Sosial
Tingkat Efektivitas Biaya	Correlation Coefficient	0.322*
	Sig. (2-tailed)	0.012
	N	60

Keterangan: (\*) adanya hubungan variable yang nyata, nilai signifikansi  $<0,05$  ( $\alpha < 0,05$ )

Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat efektivitas biaya dan tingkat modal sosial adalah sebesar 0,322. Kemudian, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,012 < \alpha$  (0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat efektivitas biaya dengan tingkat modal sosial.

Menurut responden dan informan, sistem *e-voting* dalam pelaksanaannya mengeluarkan biaya yang lebih efektif dan juga lebih efisien dalam hal waktu. Berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya yang memakan waktu cukup lama hingga larut malam. Penyediaan alat *e-voting* juga dilakukan oleh dinas bukan desa, sehingga desa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengadaan alat *e-voting* tersebut. Selain itu, berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya, pada pelaksanaan *e-voting* ini para calon kepala desa tidak lagi dipungut biaya, sehingga siapapun yang memenuhi kriteria dapat mencalonkan diri dan gratis. Beberapa hal tersebutlah yang menarik antusiasme pemilih dan membangun rasa percaya pemilih terhadap pemilihan secara keseluruhan, karena dianggap lebih praktis, tidak rumit, waktu yang singkat serta biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar apalagi alat yang digunakan disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu tingkat efektivitas biaya memiliki hubungan dengan modal sosial karena keuntungan dari penghematan biaya yang dilakukan oleh desa membangun rasa percaya masyarakat dan menghindari dugaan-dugaan politik uang yang erat kaitannya dengan pemilihan kepala desa.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

## Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan seperti berikut:

1. Tingkat keberhasilan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Babakan tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya prinsip-prinsip *e-voting*, dari kedua belas prinsip hanya tingkat verifikasiabilitas dan auditabilitas dan tingkat kebenaran yang tergolong sedang, sedangkan prinsip yang lainnya tergolong tinggi. Kemudian hasil dari pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* tersebut dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat desa. Tidak terjadi bentrokan atau keributan setelah pengumuman kepala desa terpilih seperti yang terjadi pada peristiwa pemilihan tahun 1998 lalu. Selain itu dalam hasil pemilihan dinilai dapat dipertanggungjawabkan, alat *e-voting* yang digunakan mudah dioperasikan dan dianggap lebih hemat dalam hal biaya juga waktu.
2. Tingkat modal sosial masyarakat Desa Babakan juga tergolong tinggi. Jaringan yang dimiliki oleh masyarakat cukup luas dilihat dari aktifnya mereka dalam mengikuti berbagai perkumpulan atau organisasi, seperti pengajian rutin dan kelompok tani ikan. Selain itu terdapat kebiasaan yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini, yaitu adanya nampan keliling ketika ada warga yang meninggal dunia. Kemudian, tingginya modal sosial juga dikarenakan masyarakat desa pernah mengalami konflik pada pemilihan tahun 1998 yang kemudian mereda dan seiring berjalannya waktu membuat kondisi masyarakat menjadi lebih baik.
3. Terdapat hubungan antara tingkat keberhasilan *e-voting* kepala desa dengan tingkat modal sosial masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil uji korelasi yang menyatakan semakin tinggi tingkat keberhasilan *e-voting* maka semakin tinggi tingkat modal sosial. Modal sosial masyarakat yang baik terbentuk setelah sebelumnya pernah mengalami konflik pada pemilihan sepuluh tahun lalu, yang kemudian menjadi bahan pembelajaran serta evaluasi bagi berbagai pihak dan seiring berjalannya waktu membuat kondisi masyarakat semakin baik. Tingginya modal sosial masyarakatl membuat pemilihan selanjutnya, termasuk dalam pelaksanaan *e-voting* kepala desa dapat berjalan lancar dan kondusif. Masyarakat menilai sistem pemilihan memiliki beberapa kelebihan, yaitu

lebih cepat dan praktis serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sistem *e-voting* merupakan hal yang menarik dan bagus untuk dilanjutkan khususnya di daerah “desa-kota” yang penduduknya banyak menjadi karyawan atau buruh di luar desa. Sistem *e-voting* cocok diimplementasikan karena masyarakat dengan karakteristik demikian memerlukan sesuatu yang praktis dan cepat, tidak perlu menunggu lama untuk melakukan pemilihan. Sehingga sistem *e-voting* dapat menjadi solusi agar masyarakat yang memiliki kesibukan di luar desa tetap bisa melakukan pemilihan. Namun untuk menghadapi era digital seperti sekarang ini, pelaksanaan *e-voting* perlu dikawal dengan baik. Kecanggihan teknologi yang dibarengi dengan kecerdasan individu yang mengoperasikannya bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu sehingga akan memberikan efek rusaknya modal sosial masyarakat khususnya pada aspek kepercayaan

## Saran

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya sistem yang dapat menyebarkan informasi yang memuat hasil pemilihan agar dapat diketahui oleh seluruh warga desa. Misalnya sistem tersebut dapat diakses melalui ponsel sehingga pemilih tidak perlu menunggu atau datang langsung untuk menyaksikan perhitungan dan pengumuman hasil di lokasi pemilihan. Selain itu, panitia juga bisa membuat pengumuman resmi yang disebarkan melalui fitur pesan maupun memanfaatkan media sosial yang saat ini sedang digandrungi masyarakat. Hal tersebut dapat memudahkan pemilih dalam mengetahui hasil pemilihan, melihat kebanyakan pemilih memilih untuk langsung kembali ke rumah setelah melakukan pemilihan. Sehingga meskipun tidak menyaksikan langsung, masyarakat desa akan tetap mengetahui hasil akhir dari pemilihan kepala desa.
2. Panitia perlu mengundang dan menginformasikan kepada masyarakat untuk turut serta pada kegiatan uji coba yang akan dilakukan minimal seminggu sebelum pelaksanaan dan dilakukan secara rutin agar masyarakat ingat dan tertarik untuk hadir. Selain itu, sebaiknya kegiatan uji coba dilaksanakan di

setiap RT, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan langsung mencoba alat *e-voting* sebelum pemilihan dilakukan. Sehingga meminimalisir rasa khawatir masyarakat dalam mengoperasikan alat yang akan digunakan pada pemilihan sebenarnya, khususnya para lansia.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti hubungan karakteristik masyarakat desa dengan pelaksanaan sistem *e-voting*, karena sistem *e-voting* akan dinilai baik dan perlu untuk dilanjutkan ketika sesuai dengan karakteristik masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Seperti kasus di Desa Babakan sebagai “desa-kota” dimana sebagian masyarakatnya bekerja di luar desa sehingga membutuhkan sistem pemilihan yang cepat dan praktis karena tidak perlu meluangkan waktu terlalu lama untuk melakukan pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Ciseeng dalam Angka
- [Permen] Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. [internet]. [diunduh 17 Desember 2015]. Tersedia pada: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2015/01/29/pemilihan-kepala-desa>
- Alamsyah. 2011. Dinamika Politik Pilkades Di Era Otonomi Daerah Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades. *Jurnal Tamanpraja*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]; 1(1): -. Tersedia pada: [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fprints.unsri.ac.id%2F462%2F1%2FDINAMIKA\\_POLITIK\\_PILKADES\\_DI\\_ERA\\_OTONOMI\\_DAERAH.pdf&usg=AFQjCNGUErTtcfIOUkDEgN6zWNpFfNUcHA&bvm=bv.104615367,d.c2E](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fprints.unsri.ac.id%2F462%2F1%2FDINAMIKA_POLITIK_PILKADES_DI_ERA_OTONOMI_DAERAH.pdf&usg=AFQjCNGUErTtcfIOUkDEgN6zWNpFfNUcHA&bvm=bv.104615367,d.c2E)
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Halili. 2009. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandang Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]; 14: 99-112. Tersedia pada: [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAlahUKEwiT9Jqrjc7IAhWTjo4KHUZbASE&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11060898.pdf&usg=AFQjCNEKv4kYM\\_2gs2HW-H-GshSwL0W9eA](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAlahUKEwiT9Jqrjc7IAhWTjo4KHUZbASE&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F11060898.pdf&usg=AFQjCNEKv4kYM_2gs2HW-H-GshSwL0W9eA)
- Hasbullah J. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta (ID): MR-United Press Jakarta.
- IDEA. 2011. *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*. Canberra (AUS): Program Asia dan Pasifik International IDEA.
- Jawandri. 2013. Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]; 1: 235-247. Tersedia pada: [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAHahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fjournal.ip.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fjanwandri%2520journal%2520\(02-27-13-09-2944\).pdf&usg=AFQjCNFUxQQLQPTSKmRCuZpedYrBI9W85w&bvm=bv.104615367,d.c2E](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAHahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fjournal.ip.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fjanwandri%2520journal%2520(02-27-13-09-2944).pdf&usg=AFQjCNFUxQQLQPTSKmRCuZpedYrBI9W85w&bvm=bv.104615367,d.c2E)
- Kusumastuti A. 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]. Tersedia pada: <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4740>
- Lestarini N. 2014. Gaya Komunikasi Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa 2013 (Penelitian Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Aristo*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]; 2:-. Tersedia pada: [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fprints.unsri.ac.id%2F462%2F1%2FDINAMIKA\\_POLITIK\\_PILK](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Fprints.unsri.ac.id%2F462%2F1%2FDINAMIKA_POLITIK_PILK)

- ADES\_DI\_ERA\_OTONOMI\_DAERAH.pdf&usg=AFQjCNGUErTtcfIOUkDEgN6zWNpFfNUcHA&bvm=bv.104615367,d.c2E
- Murwani P. 2013. Modal Sosial dan Pembangunan (Studi Masyarakat Desa Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat). *Jurnal Populis*. [internet]. [diunduh pada 14 April 2017]. Tersedia pada: [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_1nk.php?id=861](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_1nk.php?id=861)
- Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Permana IPI, Putra IKGD, Sasmita IGMA. 2016. Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card sebagai Kartu Pemilih. *Jurnal Lontar Komputer*. [internet]. [diunduh pada 12 Oktober 2017]. Tersedia pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=457427&val=922&title=Rancang%20Bangun%20Sistem%20Pilkades%20Menggunakan%20Teknologi%20Smart%20Card%20Sebagai%20Kartu%20Pemilih>
- Permana IPI, Putra IKGD, Sasmita IGMA. 2016. Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card sebagai Kartu Pemilih. *Jurnal Lontar Komputer*. [internet]. [diunduh pada 12 Oktober 2017]. Tersedia pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=457427&val=922&title=Rancang%20Bangun%20Sistem%20Pilkades%20Menggunakan%20Teknologi%20Smart%20Card%20Sebagai%20Kartu%20Pemilih>
- Primadona. 2012. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan (Kelompok Tani Kecamatan Rambatan). *Jurnal Polibisnis*. [internet]. [diunduh 14 April 2017]. Tersedia pada: <http://repo.polinpdg.ac.id/297/1/645-624-1-PB.pdf>
- Putnam R. 1998. *Social Capital: Measure and Consequences*. [internet]. [diunduh pada 4 Juni 2017]. Tersedia pada: <http://www.oecd.org/innovation/research/1825848.pdf>
- Rokhman A. 2013. Prospek dan Tantangan Penerapan E-voting di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*. [internet]. [Diunduh 12 Oktober 2017]. Tersedia pada: [asian.or.id/wp-content/uploads/2011/07/e-voting-ali.pdf](http://asian.or.id/wp-content/uploads/2011/07/e-voting-ali.pdf)
- Sophan MK, Rohman T. 2012. Design Model TPS dalam Sistem E-voting Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Seminar Nasional Informatika 2012*. [internet]. [diunduh pada 12 Oktober 2017]. Tersedia pada: [jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1094](http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1094)
- Umar A, Syaukani A, Rusli AM. 2014. Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. [internet]. [diunduh pada 12 Oktober 2017]. Tersedia pada: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1249>
- Uphoff N. 2000. *Social capital; A multifaced prespective*. Parta Dagusta dan Ismail Serageldin [editor]. Washington DC; World Bank.